

**YAYASAN PENDIDIKAN LEMBAGA ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERANCAH KECAMATAN  
BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Trisna Ningsih  
NPM: 147110583**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Trisna Ningsih  
Npm : 147110583  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diadangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pembimbing I



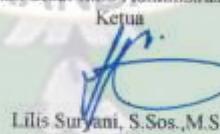
Drs. Zulkifi, M.Si

Pembimbing II



La Ode Syarifan, SE., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

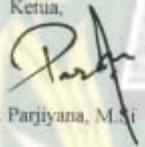
**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Trisna Ningsih  
Npm : 147110583  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Beranah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah. oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfeherensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020  
Sekretaris,

Ketua,



Drs. Parjiyana, M.Si

  
Nurmasari, S.Sos, M.Si  
Anggota,

  
Drs. Zulkifli, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan 1

  
Indra Safi, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 922/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Oktober 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Trisna Ningsih  
NPM : 147110583  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Desa Berenah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Nilai Ujian : Angka : " 76 " ; Huruf : " B "   
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si	Ketua	1.
2.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si	Anggota	3.
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 01 oktober 2020  
An. Dekan

  
Indan Safri, S.Sos, M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 922/UJR-FS/KPTS/2020  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UJR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pasasasjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Trisna Ningsih   |
| N P M              | : 147110583  |
| Program Studi      | : Administrasi Publik  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Desa Berenah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis |
- Struktur Tim :
1. Drs. Parjiyana, M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Nurmasari, S. Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Drs. Zulkifli, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 01 Oktober 2020  
Dekan  
  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
  2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
  3. Yth. Ketua Prodi .....
  4. Arsip .....sk. penguji.....

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Trisna Ningsih  
Npm : 147110583  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

An. Tim Penguji,  
Sekretaris,

Ketua,

  
Drs. Parjiyana, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**. Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian Usulan Penelitian yaitu:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin
2. Bapak Dr. H. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Lilis Suryani, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si. selaku pembimbing I yang telah sabar membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak La Ode Syarfan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan motivasi demi kelancaran proses penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Untuk Bapak Turadi, A, Md, selaku kepala Desa Berancah beserta Staff yang telah memberikan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian dan mengambil data penelitian.
8. Untuk Bapak Edi Darmawan selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Berancah beserta Staff yang telah memberikan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian dan mengambil data penelitian.
9. Kepada keluarga tercinta Ayahanda saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan kepada saudara-saudara saya, baik abang dan kakak yang tercinta yang telah memberikan kepercayaan, pengertian dan juga kesabaran, dan yang selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Usulan Penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Publik E Angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dalam naskah skripsi ini penulis sadari bhwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karna itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Penulis

Trisna Ningsih

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan penulisan dan kegunaan Penulisan .....	17
1. Tujuan Penulisan .....	17
2. Kegunaan Penulisan .....	17
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	19
1. Konsep Administrasi .....	19
2. Konsep Organisasi Publik .....	21
3. Konsep Manajemen Sektor Publik .....	22
4. Konsep Peranan .....	27
5. Konsep Pembangunan Desa .....	28
6. Konsep Pemberdayaan Desa .....	31
7. Konsep Otonomi Desa .....	34
8. Konsep Badan Usaha Milik Desa .....	33
B. Kerangka Pikir .....	37
C. Hipotesis .....	38
D. Konsep Operasional .....	39
E. Operasional Variabel .....	43
F. Teknik Pengukuran .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Teknik Penarikan Sampel .....	52
E. Jenis dan Sumber Data .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	53
G. Teknik Analisa Data .....	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	55

### **BAB IV DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Berancah .....	57
1. Sejarah Pembentukan Desa Berancah .....	57
2. Kondisi Umum Desa Berancah .....	58
3. Profil Badan Usaha Milik Desa .....	59
4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa .....	59

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	60
1. Kriteria Berdasarkan Usia .....	60
2. Kriteria Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
3. Kriteria Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	62
4. Kriteria Berdasarkan Pekerjaan .....	63
B. Variabel dan Indikator Variabel .....	65
1. Mendorong Berkembangnya Perekonomian Masyarakat .....	66
2. Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Ekonomi Produktif .....	72
3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal .....	77
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa .....	81
5. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat .....	88
C. Hambatan Yang Mempengaruhi Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 102  
B. Saran ..... 103

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 105**

**LAMPIRAN..... 108**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Penduduk Desa Berancah Berdasarkan Mata Pencaharian.....	5
I.2 : Kerangka Pemikiran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	43
I.3 : Populasi Dan Sampel Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	51
I.4 : Daftar Masyarakat yang menjadi Sup Populasi dan Sampel Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	52
I.5 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	55
IV.1 : Kondisi Umum Desa Berancah.....	58
IV.2 : Bagan Struktur Organisasi.....	59
V.1 : Karakteristik Berdasarkan Usia.....	60
V.2 : Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.3 : Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
V.4 : Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....	63
V.5 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Meningkatkan Ekonomi.....	66
V.6 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Kan Penghasilan Masyarakat.....	69
V.7 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Memberikan Modal Usaha.....	69
V.8 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Membentuk Usaha-Usaha Baru.....	73

V.9 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Memberikan Pelatihan Kepada Masyarakat.....	74
V.10 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Mengurangi Angka Pengangguran.....	76
V.11 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Mengatasi Masalah Rentenir.....	78
V.12 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Mendorong Masyarakat Dalam Menciptakan Usaha Baru.....	80
V.13 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDES Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha.....	81
V.14 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes Dalam Membuat Program Kegiatan Pembangunan Desa.....	83
V.15 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDes Dalam Bertambahnya Kas Des. ....	85
V.16 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa.....	87
V.17 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDes Sebagai Pusat Pelayanan.....	89
V.18 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDes Dalam Membantu Masyarakat Dalam Memperoleh Barang.....	91
V.19 : Jawaban Responden Tentang Peranan BUMDes Dalam Menyeimbangkan Harga Pasar.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	11
II.2 : Kerangka Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Kuisisioner Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	109
2	: Rekap Telly Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	128
3	: Daftar Telly Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	138
4	: Dokumentasi Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	139
5	: Surat Rekomendasi Penetapan Dosen Pembimbing.....	140
6	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	141
7	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis.....	142
8	: Surat Rekomendasi Dari Kantor Camat Bantan.....	143
9	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah.....	144
10	: Surat Rekomendari Penelitian Dari Kantor Desa Berancah.....	145

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERANCAH KECAMATAN  
BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh : Trisna Ningsih**

**ABSTRAK**

Kata Kunci : Peranan, Badan Usaha Milik Desa, Perekonomian

Banyak cara dalam memajukan perekonomian desa terutama harus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Mengenalkan bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian desa agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada didesa, seperti sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Hal ini terasa penting karena mengingat banyaknya potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat dalam peningkatan ekonomi yang dibantu oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah ialah, bidang-bidang perdagangan, dan bidang pertanian yang dijalankan masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, sejalan dengan penelitian tujuan penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, Kepala Unit Perdagangan, Unit Jasa, Mitra Usaha, Staf Administrasi, dan Masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan optimal dan kegiatan yang di bentuk masih kurang berperan dalam meningkatkan perekonomian desa di Desa Berancah.

**THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN UPGRATE RURAL  
ECONOMY IN VILLAGE BERANCAH KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh : Trisna Ningsih**

**ABSTRAK**

*Key Words : Role, village-owned enterprise, economy*

*There are many ways to advance the village economy, especially the economy of the surrounding communitities. Introducing the bussines fields run by village owned enterprises in the scaffolding of Bantan Sub-district of Bengkslid district is also one of the ways to improve the village economy so the community can utilize the potentials in the village, such a natural resources and human resouces. This feels important because considering the many potentials possessed by the scaffold villages of the Bantan Sub-district of Bengkalis district. The activities proposed by scaffold village owned enterprises are, the fields of trade, and agriculture carried out by the Bengkalis scaffold community in line with the purpose of this study, then the study population is the village head,, village secretary. BPDchair, BUMDES, head of the trade unit, service unit, bussines partners, administrative staff ,and the community. Village-owned enterprises with scafolldin, Bantan sub-district for Bengkalis district have not run optimally and the activities that are formed are still lacking are inimproving the village economy in scaffold villages.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas untuk mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka manusia membutuh uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkorelasi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kualitas kerja yang di hasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama koferatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus mengendalikan dunia sekitar demi kesejahteraan ialah administrasi.

Administrasi merupakan suatu yang ditetapkan disebuah organisasi hal ini karena organisasi adalah setiap bentuk persekutan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Administrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan suatu tugas. administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan

tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Negara kesatuan republik indonesia merupakan suatu organisasi yang sangat besar, dimana di dalam nya dibutuhkan manajemen yaitu, suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Ilmu manajemen ini sebenarnya telah diterapkan negara kesatuan republik indonesia agar tujuan negara kesatuan republik indonesia dapat tercapai. Negara kesatuan republik indonesia terdiri dari berbagai pulau besar kecil, jumlahnya pun lebih besar dari 7000 pulau yang terbentang dari sabang sampai marauke, sehingga tidak mungkin segala sesuatunya di atur oleh pemerintah. Untuk itu perlu adanya pemerintah daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah masing-masing.

Keberadaan pemerintah daerah menjadi landasan yuridis dengan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) disebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah kabupaten dan kota mempunyai daerah pemerintahan sendiri". Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu.

Kehadiran undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah menjabarkan dan melaksanakan tujuan maksud dari pasal 18 UU Dasar 45, selain mengatur tentang kedudukan pemerintah daerah dalam pasal 18 ayat 2 juga disebutkan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam ketentuan itu, menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kotabersifat otonom yang artinya wilayah daerah tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonom dan tugas pembantuan. Asas otonomi adalah bentuk hak, wewenang dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tugas pembantuan adalah bentuk tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Artinya desa sebagai salah satu daerah otonomi yang dapat mengembangkan daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Artinya dalam pengembangan desa, daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sendiri daerahnya. Hal ini dikarenakan oleh daerah geografis di daerah-daerah negara indonesia yang berbeda-beda, maka hal ini dikemungkinan untuk dapat mengembangkan daerah-daerah di indonesia, atau dengan istilah hak otonomi yang seluas-luasnya.

Pengertian desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adapun hak dan kewajiban Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 67 ayat (1 dan 2) ialah:

- (1) Desa berhak:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak dan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Desa Berancah merupakan Desa pemekaran dari Desa Selatbaru. Pejabat kepala Desa Berancah pertama yaitu bapak Dedy Azral, S.Pi, yang dilantik pada tanggal 18 desember 2013, Desa Berancah terdiri dari 5 (lima) kewilayahan/dusun yaitu: Dusun Penawa Darat, Dusun Penawa Makmur, Dusun Penawa Jambu, Dusun Berancah dan Dusun Seberang. Pemilihan pertama kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 11 juli 2017 dan yang terpilih adalah Turadi, A, Md, . pemerintah Desa terarah terus berusaha maksimal untuk melaksanakan amanah masyarakat untuk melaksanakan segala kewajiban pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat desa berancah memiliki beberapa Unit Desa dan Lembaga Pemberdayaan Desa diantaranya Unit Simpan Pinjam Tunas Jaya dan dimana bidang Lembaga Pemberdayaan Desa Berancah terdiri dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri, Karang Taruna, Kelompok Tani/Nelayan, Lembaga Adat, LPMD/LPMK, Organisasi Keagamaan, PKK, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.

**Tabel I.1: Jumlah Penduduk Desa Berancah Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah	Persen %
1	Petani	223	11	234	20,96%
2	Buruh Tani	5	0	5	0,44%
3	PNS	7	5	12	1,07%
4	Pedagang Barang Kelontong	4	0	4	0,35%
5	Nelayan	35	0	35	3,13%
6	Montir	3	0	3	0,26%
7	Perawat Swasta	0	1	1	0,08%
8	Polri	1	0	1	0,08%
9	Guru Swasta	3	7	10	0,89%
10	Dosen Swasta	1	0	1	0,08%
11	Pedagang Keliling	1	0	1	0,08%
12	Pembantu Rumah Tangga	0	11	11	0,98%
13	Karyawan Perusahaan Swasta	7	2	9	0,80%
14	Karyawan Perusahaan Pemerintah	0	2	2	0,17%
15	Wiraswasta	5	4	9	0,80%
16	IRT	0	552	552	49,46%
17	Buruh Harian Lepas	215	4	219	19,62%
18	Sopir	1	0	1	0,08%
19	Tukang Jahit	0	2	2	0,17%
20	Karyawan Honorer	9	4	13	1,16%
21	Tukang Las	1	0	1	0,08%
22	Anggota Legislatif	1	0	1	0,08%
<b>Jumlah</b>		<b>522</b>	<b>605</b>	<b>1116</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Berancah yang didominasi oleh wilayah Desa Berancah adalah pertanian, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani terutama karet.

BUM Desa Mutiara Mandiri merupakan badan usaha masyarakat yang siap bersama-sama menggali segala potensi yang ada guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat perdesaan dan umumnya mampu membantu dalam program peningkatan ekonomi nasional. Pembentukan BUM Desa Berancah berdasarkan Musyawarah Desa Berancah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di gedung MDTA Al- Hidayah Desa Berancah. BUM Desa yang didirikan dengan nama Mutiara Mandiri. BUM Desa Mutiara Mandiri berkedudukan di Desa Berancah Kecamatan Bantan.

Adapun tujuan pembentukan BUM Desa adalah:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- b. Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Desa
- c. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Visi dan Misi BUM Desa di antaranya:

Visi: Menjadikan Usaha Desa yang mandiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Desa sehingga terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Misi BUM Desa adalah:

1. Menjadikan salah satu pendapatan asli Desa yang dapat mendorong perekonomian masyarakat
2. Menjadikan lembaga Desa yang profesional dan terbuka dalam melaksanakan usaha demi untuk kemajuan organisasi
3. Menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran usia muda dan meningkatkan usaha masyarakat melalui kemitraan
4. Menberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa ini diatur dalam Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan dalam pasal 2 yaitu pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola untuk desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Dari fungsi badan usaha milik Desa tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa, maka tentu saja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut agar lebih profesional demi menghasilkan

sumber penghasilan masyarakat Desa. Dalam hal ini dapat beberapa alasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- a. Alasan ekonomi, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan ekonomi di Desa upaya menggali serta mengembangkan sumber daya Desa, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan.
- b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha melayani kepentingan publik, baik investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalisasi sangat besar dan luas.
- c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah Desa dalam mencari pendapatan diluar pajak, retibusi dan pertimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerintah Desa.
- d. Alasan politik, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politik dalam pemerintah Desa, yang mana alasan politisnya biasanya jarang dikemukakan, lebih lagi secara formal.

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal (3) tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa,
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,

- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Melihat dari potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang begitu penting maka daerah-daerah merasa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dibentuk didaerahnya seperti halnya Kabupaten Bengkalis yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didaerahnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kabupaten Bengkalis.

Pada Desa pelepasan manajemen Pemerintah Provinsi Riau tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal manajemen, Pembinaan, Fasilitas, Pendamping dan lainnya yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP) yang dalam proses menuju Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk lembaga keuangan lainnya juga merupakan bagian yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di kabupaten Bengkalis Baru terlaksana pada tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara serentak di seluruh kabupaten Bengkalis. salah satunya ialah Badan Usaha Milik Desa Berancah.

Adapun wilayah Desa Berancah ini berada di kecamatan Bantan. Dimana jumlah desa yang berada di wilayah kecamatan Bantan ialah sebagai berikut:

1. Kelurahan/Desa Berancah

2. Kelurahan/Desa Bantan Air
3. Kelurahan/Desa Bantan Tengah
4. Kelurahan/Desa Bantan Sari
5. Kelurahan/Desa Bantan Timur
6. Kelurahan/Desa Bantan Tua
7. Kelurahan/Desa Deluk
8. Kelurahan/Desa Jangkang
9. Kelurahan/Desa Kambung Baru
10. Kelurahan/Desa Kambung Luar
11. Kelurahan/Desa Mentayan
12. Kelurahan/Desa Muntai
13. Kelurahan/Desa Muntai Barat
14. Kelurahan/Desa Pambang Baru
15. Kelurahan/Desa Pambang Pesisir
16. Kelurahan/Desa Pasiran
17. Kelurahan/Desa Resam Lapis
18. Kelurahan/Desa Selatbaru
19. Kelurahan/Desa Sukamaju
20. Kelurahan/Desa Teluk Lancar
21. Kelurahan/Desa Teluk Pambang
22. Kelurahan/Desa Teluk Papal
23. Kelurahan/Desa Ulupulau



Dilihat dari beberapa Desa yang berada di Kecamatan Bantan ialah Desa Berancah, dimana di Desa Berancah terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri. Adapun maksud dan Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berancah menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Pasal 4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Mandiri Desa Berancah adalah:

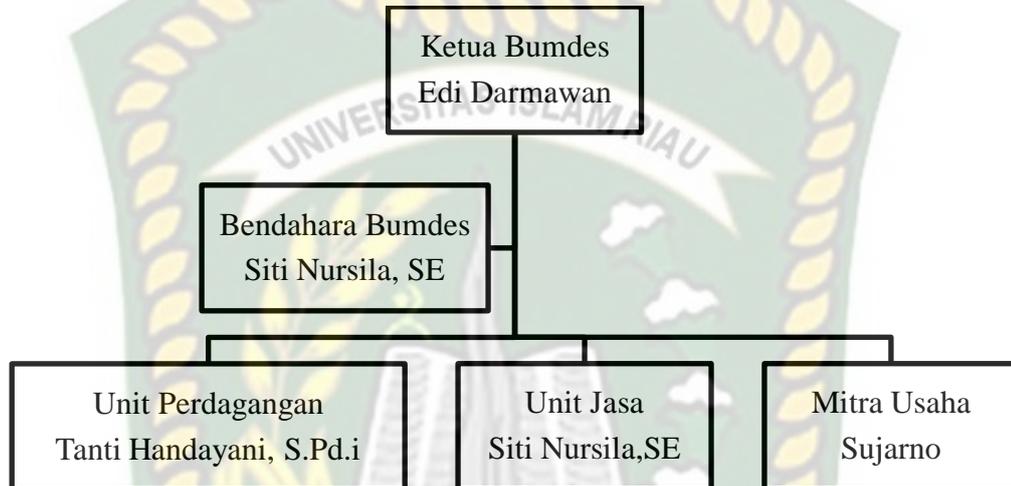
- a) Maksud  
untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan Desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian Desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa.
- b) Tujuan  
untuk mendapatkan pendapatan asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Adapun kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri dalam pasal 12 Peraturan Desa No .03 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ialah:

1. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara Ex Officio  
Oleh Kepala Desa
2. Direktur dan Pengawas dipilih melalui musyawarah Desa setelah dilakukan seleksi oleh Pemerintah Desa dan dan di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa
3. Direktur dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara

4. Kepala Unit Usaha dipilih melalui musyawarah Desa setelah dilakukan seleksi oleh Pemerintah Desa.

**Gambar II.I: Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**



*Sumber: Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018*

Sumber permodalan Badan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 13 Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ialah:

1. Sebagian atau seluruh kekayaan Desa Berancah yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa Berancah
2. Bantuan Pemerintah Pusat
3. Bantuan Pemerintah Provinsi
4. Bantuan Pemerintah Kabupaten
5. Penyertaan Modal Pihak lain, atau kerja sama bagi hasil yang saling menguntungkan

## 6. Penyertaan modal masyarakat dan pinjaman pihak ketiga

Atas dasar permodalan tersebut maka dibentuklah Program Usaha Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis kelompok usaha tersebut ialah:

### a. Perdagangan dan Industri

Ex: Penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti Pupuk (Urea, KCL,NPK dll). Mulsa, pakan ternak, benih tanaman (timun, kangkung, cabe, pepaya dll). Racun (Herbisida, insektisida, fungisida, dan pestisida)

- Mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai pupuk dan berbagai jenis benih- benih sayuran.
- Mendorong masyarakat agar berimajinasi dalam bertani.

### b. Produksi (Mitra Usaha)

Ex: Penyediaan Bubuk Kopi

Bubuk kopi yang digunakan oleh pihak BUMDes memiliki kualitas original tanpa bahan campuran apapun, jenis kopi lokal dan kadang juga diolah dari luar karna bahan baku kopi lokal masih terbatas belum menunjang untuk produksi secara rutin.

- Mendorong masyarakat agar berimajinasi dalam menciptakan suatu usaha baru.

### c. Unit Simpan Pinjam

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh modal usaha dengan jasa pinjaman seminim mungkin.

Bentuk usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis saat ini adalah Simpan Pinjam. Simpan Pinjam Tunas Jaya dibentuk melalui Musyawarah Desa pada tanggal 06 Oktober 2015 di Kantor Desa Berancah, yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Koordinator Kecamatan, Pendamping Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setiap kegiatan manusia mempunyai tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Maka diperlukan organisasi yang menjamin keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa maka dibentuklah secara khusus lembaga dan pengurus Usaha Ekonomi Simpan Pinjam yang dibentuk melalui tes oleh tim dan berdasarkan nilai tersendiri, serta forum masyarakat yang dipimpin dan difasilitasi oleh pendamping desa bersama kepala Desa dan selanjutnya disahkan SK oleh kepala Desa serta diketahui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis atas nama Bupati Bengkalis.

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan ialah dengan bentuk pinjaman yang di pinjamkan kepada masyarakat Desa Berancah. Cara melakukan peminjaman kepada Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Bantan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Milik Desa (Simpan Pinjam) besar dan jangka waktu peminjaman, dan kemudian Badan Usaha Milik Desa melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, tentang permohonan si peminjam tersebut. Dari hasil musyawarah tersebutlah pihak

Badan Usaha Milik Desa Berancah menerima atau menolak permohonan calon peminjam tersebut. Adapun persyaratan dalam melakukan peminjaman di Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan ialah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Ahli Waris 2 Rangkap
3. Fotocopy Kartu Keluarga 2 Rangkap
4. Fotocopy Anggunan
5. Pas Foto 3x4 3 Lembar
6. Surat Keterangan Usaha (SKU) Desa
7. Uang Administrasi 60 Ribu

Bidang usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan saat ini yaitu bidang usaha Simpan Pinjam yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan masih mengutamakan keuntungan dari pada pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir masih banyak yang belum tau tentang apa program yang dijalankan oleh pihak BUMDes. Saat ini bidang usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan ialah simpan pinjam (UED-SP).

Selain itu juga dapat melakukan pembayaran tagihan PLN Pasca Bayar, PLN Pra Bayar, Telkom, BPJS Kesehatan, TV Berbayar, Tiket Pesawat dan kereta api, Pulsa Pasca Bayar All Opr, All Multi Finance (Adira, FIF, WOM, ACC, dll), perlengkapan alat-alat tulis . Sehingga dengan adanya kerja sama tersebut maka dapat memudahkan juga membantu masyarakat dalam segala bentuk pelayanan transaksi online.

Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat berperan dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa Berancah, dengan cara mensukseskan tujuan yang telah dicantumkan didalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Dalam pelaksanaan Peran Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis masih banyak masalah yang dirasakan penulis seperti masih sedikitnya masyarakat yang tidak mengetahui atau menggunakan jasa Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri Desa Berancah Kecamatan Bantan.

Berdasarkan fenomena yang diamati dilapangan, masih ada beberapa kesalahan yang diamati oleh penulis yaitu:

1. BUM Desa belum dijadikan sebagai sarana kebutuhan bagi masyarakat
2. Usaha-usaha yang didirikan tergolong baru jadi membutuhkan usaha yang keras untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang produk dan jasa yang diberikan.
3. Lokasi usaha yang kurang strategis
4. Penyertaan modal yang terbatas yang diberikan sehingga belum bisa menjalankan usaha-usaha yang strategis secara langsung (bertahap)

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terlebih lanjut dengan judul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam MeningkatkanPerekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### 1) Secara Teori

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah ekonomi khususnya terdapat dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

- b. Ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam penulisan ini, penulis harapkan dapat menjadi nilai tambahan Ilmu Pengetahuan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada umumnya pada Program Studi Administrasi Publik khususnya.

- c. Dapat mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Berancah.

2) Secara Praktis

- a. Pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis agar sesuai dengan kondisi Rill dalam pelaksanaan serta dapat mengatasi masalah-masalah dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
- b. Memberi informasi dan wawasan bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ketopik yang mirip ataupun yang lain.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingatkancakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

##### 1. Konsep Administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas, agar mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka manusia membutuh uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkorelasi dengan semaikin meningkatnya kualitas dan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama koferatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan adalah administrasi.

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrative* yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinandan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut juga *amministrazione* (Syafri. 2012;3).

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. (Syafri, 2012;3-4).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagan. 2003;2).

Menurut Pradjudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa yang hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisasi.

Selanjutnya menurut Voll (2013;4) administrasi (*administrare*) adalah mempunyai dua arti pertama, kegiatan catat mencatat, mereka atau kompleks jabatan-jabatan yang menyelenggarakan kegiatan pencatatan termasuk pada poin pertama.

Administrasi merupakan upaya sadar kerjasama antar manusia yang memiliki derajat rasionalitas yang tinggi dan akhirnya akan sampai pada sebuah titik yang dinamakan tujuan (dalam Wicksono 2014;9).

Menurut Wilson (dalam Thoha 2008;9) bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan oleh politik (dalam Thoha 2008;9).

Menurut White administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha-usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun ukuran kecil (dalam Safiie 2003;13).

Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafiie.2003;5).

Dengan demikian administrasi sering dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

## **2. Konsep Organisasi Publik**

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber

daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi jauh lebih efektif. Di Indonesia sering terjadi *inefektivitas implementasi* kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakanyang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

### **3. Konsep Manajemen Sektor Publik**

Secara sederhana, Manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah. Secara khusus manajemen publik menunjukkan pada manajemen instansi pemerintah (Keban, 2004). Ott, Hyde, dan Shafritzs (1990) menjelaskan bahwa manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan intenal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang

pada hubungannya dan interaksinya dengan legislatif, peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya. Sedangkan Graham and Hays, *public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement (efektivitas), and other managerial and technical question*. Overman (dalam Keban, 2004) menyebutkan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing dan controlling* disatu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Selanjutnya Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Keban, 2004) berpendapat bahwa manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan kedalam program-program tindakan. Sebagai contoh: perencanaan dan manajemen strategi, sistem klasifikasi jabatan, prosedur seleksi dan perekrutan pegawai, analisis dan formulasi anggaran, keahlian supervisi, evaluasi organisasi dan program, manajemen program/proyek, manajemen kinerja, dan seterusnya.

Keterkaitan manajemen publik dan manajemen privat/bisnis adalah bahwa manajemen publik merupakan administrasi organisasi pemerintah dan non-profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta/bisnis (*privat and public management are similar*). Karenaitu, alat-alat manajerial bisnis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat juga diterapkan di dalam organisasi publik/non-profit.

Kemudian Owen Hughes (1994) menjelaskan, yang membedakan manajemen privat dan manajemen publik adalah:

1. Keputusan sektor publik bersifat memaksa (*coercive*)
2. Sektor publik mempunyai berbagai bentuk akuntabilitas
3. Manajemen sektor publik harus menyesuaikan dengan agenda pemimpin politik
4. *Output* dan efisiensi produksi sektor publik sulit untuk diukur. Ukuran dan kompleksitas sektor publik menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan pengawasan.

Sedangkan menurut Farnham & Horton (dalam Keban, 2004), perbedaan manajemen privat dan manajemen publik adalah:

1. *Goals* manajemen bisnis: *market/profit oriented* (ekspansi, dominasi pasar, reputasi bisnis, dan seterusnya) diteruskan oleh pemimpin/pemilik perusahaan. Sedangkan manajemen publik: rumusan tujuan sangat umum kabur, jarang ditinjau kembali/diubah, kompleks, saling bertentangan, dirumuskan oleh lembaga politik untuk tujuan kolektif atau politik.
2. Akuntabilitas manajemen bisnis, bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil, penggunaan sumber daya, penyediaan barang dan jasa kepada: pemegang saham, pekerja, *supplier* dan *customers*. Sedangkan manajemen publik yang termasuk didalamnya organisasi publik adalah lembaga negara yang merupakan bagian dari badan kekuasaan sehingga bertanggung jawab pada publik/rakyat yang dilayani.

3. Struktur manajemen bisnis: *task culture, task oriented, flexible, shorter/less hierarchy, more delegation, willingly to take decisiona maximize individual disrection, wider spans of control*. Sedangkan manajemen publik memiliki cakupan budaya organisasi pemerintah/birokrasi. Dengan begitu, tanggung jawab dirumuskan dengan tepat dan delegasi wewenang dan diskreksi dibatasi. Karakteristik manajemen birokrasi bersifat *mekanistik, long chain of command, narrow span of control, hierarkis*.

Secara sederhana dapat diartikan, manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya dan publik mersa terpenuhi semua keinginannya dengan kinerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya bukanlah murni untuk mencapai profit organisasi melainkan melayani konsumen yaitu masyarakat, sehingga pemerhatian manajemen adalah pada semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi.

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan—kegiatan orang lain. Menurut Siagan (1985:5) manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

Menurut Jhon D.Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto,2005;1).

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata (dalam Terry,et.al.2015;1).

Koonzt dan O'donnel mengemukakan manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan porang lain (dalam Marnis,2009 2009;3).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen dapat diartikan sebagai seni atau ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto, 2005;3).

#### **4. Konsep Peranan**

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti sandiwara (film), tukang lawak dalam permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan.

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran

adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999:118).

Pengertian menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara umum peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## **5. Konsep Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal secara definitif keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarjan (dalam Darmansyah dkk, 1986) menyebutkan bahwa masyarakat Desa (*community development*), usaha pembangunan hanya diarahkan pada kualiti manusianya, sedangkan pembangunan Desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan masyarakat Desa mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan

(*community approach*) dan pengorganisasian masyarakat (*community organization*). Sedangkan pembangunan Desa sebagai *rural development* lebih luas dimana pembangunan masyarakat Desa sudah tercakup didalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Tujuan pembangunan Desa lebih identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan perdesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Secara rinci, Djiwadono, (1981) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; *Pertama*, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah perdesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah perdesaan. *Kedua*, tujuan sosial diarahkan pada pemerataan kesejahteraan penduduk Desa. *Ketiga*, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat perdesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Napitupulu (1974) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama

dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan Desa (*community development*) dan pembangunan masyarakat Desa (*rural development*) sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang memiliki keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan Desa sudah tercakup didalamnya pembangunan masyarakat Desa.

Menurut Azam Awang (2010), terdapat tiga model pembangunan perdesaan diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, model "*community development*" atau "pembangunan masyarakat", sejarah panjangnya berawal pertama kali dikembangkan oleh pemerintah kolonial inggris di Etawah, india, pada tahun 1920. Model ini mengajarkan pada penduduk perdesaan keterampilan sosial, ekonomi, dan politik agar tercipta masyarakat yang modern. *Kedua*, model "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan", yang mulai berkembang pada tahun 1970-an akibat gagalnya model "*trickle down*", guna pemerataan hasil pembangunan. Model ini merupakan "*empowerment*" atau pemberdayaan masyarakat yang mengusung tema pembangunan dari bawah/atau partisipasi masyarakat atau "*bottom-up*". *Ketiga*, model "Desentralisasi", yaitu pemerataan pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program yang direncanakan.

Pada dasarnya pembangunan pembangunan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual didasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman,

tentram dan dinamis. Secara rinci Djiwandono, (1981) menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktiviti di daerah perdesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah perdesaan
2. Tujuan sosial, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk Desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat perdesaan.
3. Tujuan demokrafis, kearah meningkatkan potensi sumber daya alam, dan tingkat pendapatan penduduk per-kapita.
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dam mengembangkan partisipasi masyarakat Desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

## 6. Konsep Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah sebuah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutuskan atau *breakdown* dari hubungan antara subjek dan objek . proses ini mementingkan penguatan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki oleh objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalir daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada akan

dicirikan dengan realitasi antara objek dengan subjek lain (dalam Vidhiyandika, 1996;135).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya untuk membuat suatu kemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk mendirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh keluarga. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam Lembaga Swadaya Masyarakat atau swadaya yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi keluarga.

Uraian mengenai pemberdayaan dimulai dengan membahas mengenai kemiskinan, sebab kemiskinan dinilai sebagai salah satu sebab diperlukannya pemberdayaan masyarakat. Ada banyak sisi pandang mengenai kemiskinan Badan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (2001) mengemukakan bahwa ada sembilan dimensi:

- a. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan, dan papan),
- b. Tidakadanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan,pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi),
- c. Tidak adanya jaminan masa depan karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga,
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam,

- e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individu dan masalah,
- f. Tidak melibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat,
- g. Tidak adanya akses lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan,
- h. Ketidak mampuan berusaha karena kecacatan fisik dan mental,
- i. Ketidak mampuan dan ketidak beruntungan sosial atau anak-anak terlantar dan wanita korban kekerasan rumah tangga.

Menurut Suharto (2006;58-59) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang lain menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dengan mempengaruhi kehidupannya.

Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yakni: *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi keluarga berkembang. Artinya, setiap anggota keluarga dapat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam menuju kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesejahteraan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomikeluarga berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,

serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Menurut Suharto (2006;58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang pada khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas dari kebodohan, kelaparan dan kemiskinan,
- b. Menjangkau sumber produktif yang mungkin mereka yang dapat meningkatkan pendapatannya,
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan desa adalah upaya untuk membuat suatu kemampuan atau kekuatan terhadap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

## **7. Konsep Otonomi Desa**

Penyelenggaraan pemerintah Desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi

Desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Prinsip utama otonomi Desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah perdesaan. Selayaknya Desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola Desa melalui perturan yang dibuat secara mandiri. Semenjak masa lampau, ciri paling kuat pemerintahan desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (dalam potensial) ketimbang modal keuangan (Mubyarto, 2000). Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan merupakan landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi. Mengerucutnya ekonomi daerah menuju desa seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli Desa. Hal ini merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah agar memberi otonomi murni agar Desa dapat mengurus dirinya sendiri. Berbagai bukti penghasilan praktik pengelolaan sumber daya

hutan memberi bukti otonomi Desa dapat diproses melalui kehandalan modal sosial dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

## **8. Konsep Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi Desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

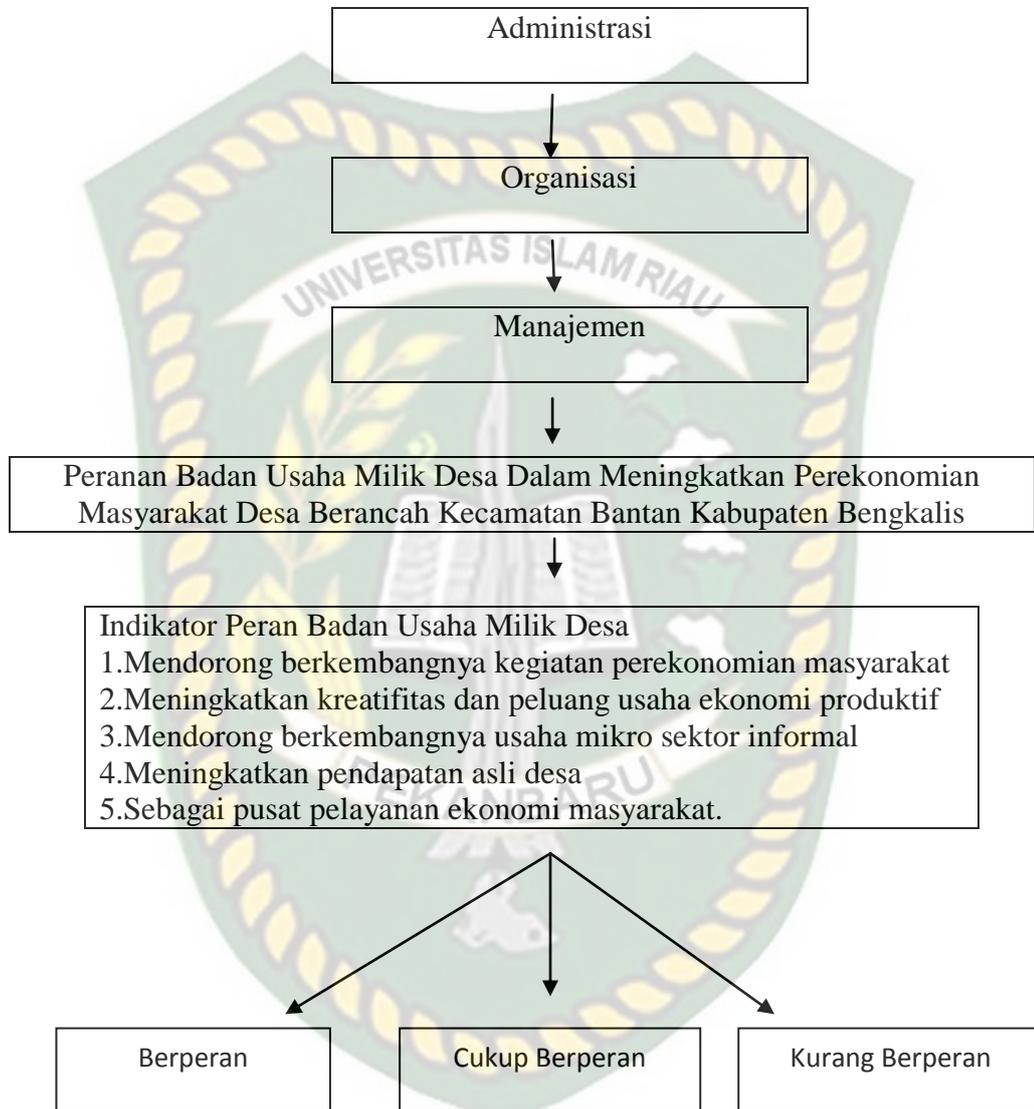
Badan usaha milik Desa (BUMDes) menurut Muryani (dalam Ilham 2008) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.

## **B.Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, adapun indikator yang peneliti gunakan dari fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maka indikator dalam penelitian ini meliputi:

1. Berperan
2. Cukup Berperan
3. Kurang Berperan

**Gambar II.2.: Kerangka Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**



Sumber: Hasil Modifikasi Tahun 2018

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono. 2017;105)

Suatu hipotesis dapat dianggap benar apabila disertakan dengan fakta-fakta dan dibuktikan nyata. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah

diduga Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam MeningkatkanPerekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum bisa melaksanakan peranannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya fungsi Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum dapat mendorong perekonomian Desa di Desa Berancah.
2. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum dapat meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira usaha) anggota masyarakat Desa.
3. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum dapat mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.
4. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum bisa meningkatkan pendapatan asli Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum bisa menjadi pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat.

#### **D. Konsep Operasional Variabel**

Konsep operasional variabel adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan

menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat defenisi-defenisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas masalah ini, yaitu :

1. Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.
3. Manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan
4. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
5. Pembangunan Desa adalah sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang memiliki keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.
6. Otonomi Desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat kswadayaan yang telah lama dimiliki oleh Desa, dalam satu kesatuan wilayah perdesaan.

7. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa-Desa atau kelurahan-kelurahan.
10. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan lah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
11. Peranan adalah peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

12. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat adalah bentuk dari usaha Badan Usaha Milik Desa Berancah agar masyarakat merasa terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.
10. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi masyarakat adalah guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran masyarakat Desa Berancah.
11. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi masyarakat adalah guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan.
12. Mendorong usaha mikro sektor informal adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah agar mendorong masyarakat dapat memulai usaha-usaha kecil, dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan masalah sosial lainnya.
13. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa Berancah untuk meningkatkan pembangunan Desa.
14. Sebagai pusat pelayanan ekonomi adalah pelayanan ekonomi masyarakat berupa memberikan kemudahan akses untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

## E. Operasional Variabel

**Tabel I.2: Kerangka Pemikiran Peranana Badan Usaha Milik Desa Dalam MeningkatkanPerekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melakukan suatu peranan( menurut Soerjono Soekanto 2002,243).	Peranan Badan Usaha Milik Desa.	1.Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat	a.Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat b.Meningkatkan penghasilan masyarakat c.Memberikan modal usaha bagi pelaku ekonomi	a.Berperan b.Cukup berperan c.Kurang berperan
		2.Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif	a.Terbentuknya usaha-usaha baru b.Memberikan pelatihan kepada masyarakat c.Mengurangi angka pengangguran	a.Berperan b.Cukup berperan c.Kurang berperan
		3.Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal	a.Terlepasnya msasyarakat dari rentenir b.Mendorongma syarakat dalam menciptakan usaha baru c.Memberikan bantuan modal usaha	a.Berperan b.Cukup berperan c.Kurang berperan
		4.Meningkatkan pendapatan	a.Terbentuknya kegiatan pembangunan	a.Berperan

1	2	3	4	5
		asli desa	desa b. Bertambahnya kas desa c. Meningkatkan perekonomian desa	b. Cukup berperan c. Kurang berperan
		5. Sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat	a. Membantu masyarakat dalam hal modal usaha b. Membantu masyarakat dalam mendapatkan barang c. Memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar.	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan

Sumber: Hasil Modifikasi Tahun 2018

### F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan. Uraian dari masing-masing pengukuran tersebut adalah:

Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan 5 hingga 6 indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 67% -100%

Cukup Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan 2 hingga 4 indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 33% -66%

Kurang Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan 0-1 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 0% -32%

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, kriteria pengukuran adalah:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat

Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat telah menjalankan 4-5 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 67% -100%

Cukup Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat telah menjalankan 2-3 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 33% -66%

Kurang Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat

telah menjalankan 0-1 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 0% -32%

## 2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif

Berperan : Apabila hasil penilaian terhadap peningkatan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif telah menjalankan 4-5 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 67% -100%

Cukup Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif telah menjalankan 2-3 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 33% -66%

Kurang Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap peningkatan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif telah menjalankan 0-1 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 0% -32%

## 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal

Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal telah menjalankan 4-5 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 67% -100%

Cukup Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal telah

menjalankan 2-3 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 33% -66%

Kurang Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal telah menjalankan 0-1 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 0% -32%

#### 4. Meningkatkan pendapatan asli desa

Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pendapatan asli desa telah menjalankan 4-5 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 67% -100%

Cukup Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pendapatan asli desa telah menjalankan 2-3 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 33% -66%

Kurang Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pendapatan asli desa telah menjalankan 0-1 item yang dinilai atau jawaban responden pada kategori 0% -32%

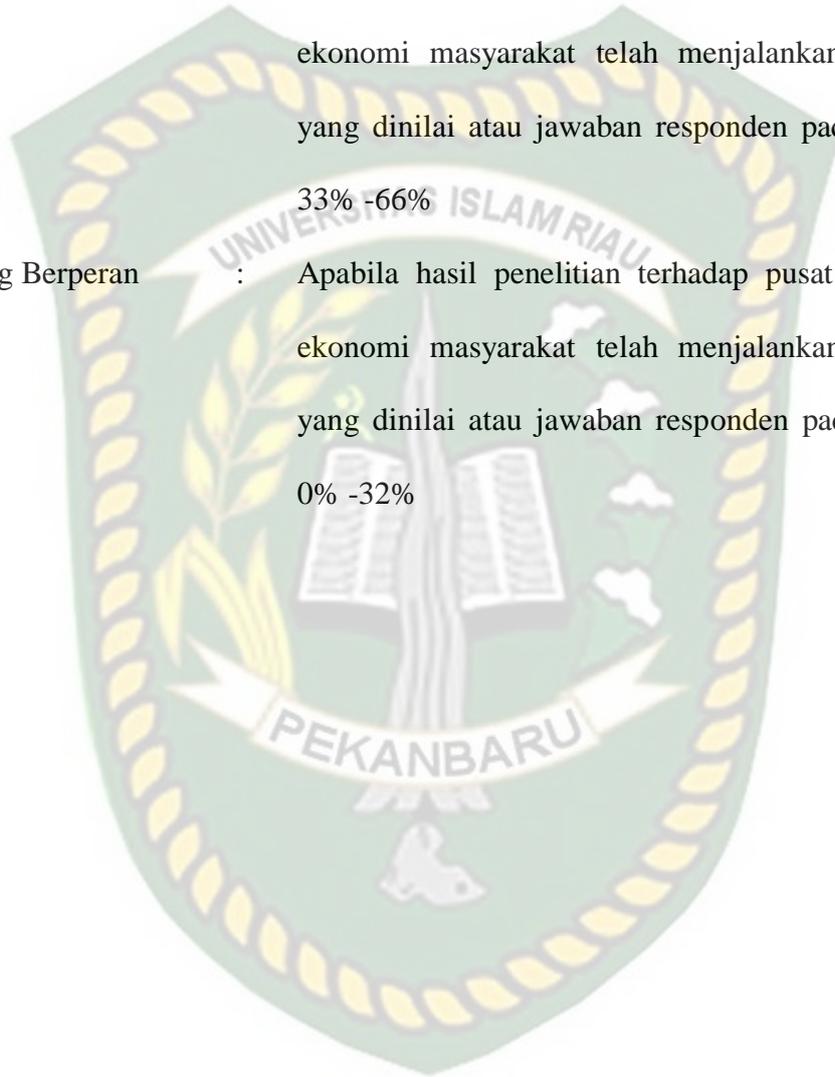
#### 5. Sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat

Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap pusat pelayanan ekonomi masyarakat telah menjalankan 4-5 item

yang dinilai atau jawaban responden pada kategori  
67% -100%

Cukup Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap pusat pelayanan  
ekonomi masyarakat telah menjalankan 2-3 item  
yang dinilai atau jawaban responden pada kategori  
33% -66%

Kurang Berperan : Apabila hasil penelitian terhadap pusat pelayanan  
ekonomi masyarakat telah menjalankan 0-1 item  
yang dinilai atau jawaban responden pada kategori  
0% -32%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah survey deskriptif adalah menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menganalisis sehingga diperoleh hasil sesuai dengan masalah penelitian. Alasan penulis menggunakan survey deskriptif ini pada umumnya penulis bisa menggambarkan keadaan sebenarnya pada saat penelitian dilapangan atau di Badan Usaha Milik Desa, dari pengamatan yang ada dilapangan untuk bisa mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penulis melakukan pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner. selanjutnya mengklasifikasikan dan menganalisis data sehingga diperoleh analisa masalah yang dihadapi oleh penulis.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017;23) dapat diartikan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasan penulis menggunakan tipe ini adalah untuk mengetahui secara konkrit, teramati tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Beranah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis melalui pengumpulan

data dilapangan setelah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis karena penulis menemukan adanya masalah pada Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2017;136) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2017;137) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

**Tabel I.3 :Populasi dan Sampel Penelitian Tentang PerananBadan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Beranah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

No	Sup Populasi	Populasi	Sampel	Persen%
1	Kepala Desa	1	1	2,63%
2	Sekretaris Desa	1	1	2,63%
3	Ketua BPD	1	1	2,63%
4	Direktur BUMDes	1	1	2,63%
5	Kepala Unit Perdagangan	1	1	2,63%
6	Unit Jasa	1	1	2,63%
7	MitraUsaha	1	1	2,63%
8	Staf Administrasi	1	1	2,63%
9.	Masyarakat	30	30	78,95%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Badan Usaha Milik Desa Tahun 2018*

**Tabel I.4 : Daftar Masyarakat yang menjadi Sup Populasi dan Sampel Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

No	Sup Populasi	Populasi	Sampel	Persen %
1	Petani	8	8	26,66%
2	Buruh Tani	2	2	6,66%
3	Pegawai (PNS)	1	1	3,33%
4	Pedagang Barang Kelontong	1	1	3,33%
5	Nelayan	1	1	3,33%
6	Montir	1	1	3,33%
7	Guru Swasta	2	2	6,66%
8	Pedagang Keliling	2	2	6,66%
9	Pembantu Rumah Tangga	2	2	6,66%
10	Wiraswasta	1	1	3,33%
11	Belum Bekerja	1	1	3,33%
12	Pelajar	1	1	3,33%
13	IRT	2	2	6,66%
14	Buruh Harian Lepas	1	1	3,33%
15	Sopir	1	1	3,33%
16	Tukang Jahit	1	1	3,33%
17	Karyawan Honoror	1	1	3,33%
18	Tukang Kayu	1	1	3,33%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2018

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitaian ini teknik penarikan sampel yang digunakan penelitian ini adalah Sensus dan Purposive Sampling hal ini karena mengingat jumlah Populasi yang terlalu besar sehingga penulis membatasi sebagian sampel. Adapun yang terjadi populasi dan sampel penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, Sekretaris Desa, Kepala Unit Perdagangan, Staf Administrasi,

Pengawasan Kecamatan dilakukan dengan menggunakan Teknik Sensus sementara Masyarakat menggunakan Teknik Purposive Sampling.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang dikumpulkan yaitu:

##### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh dari penyebaran Questioner (angket) dan hingga melakukan interview.

##### **2. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh melengkapi data primer yang berupa data yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik:

1. Questioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam

arti bahwa data tersebut dihimbau melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindera.

3. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa dan dari karya ilmiah yang relavan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisi data yang digunakan adalah deskriptif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan menurut jenisnya lalu disusun dan dianalisa selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan dalam uraian analisa ditambah dengan analisa kuantitatif dalam bentuk tabel.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Judul Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Beranah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis:

**Tabel I.5 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Beranah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

No	Kegiatan	2018												2019											
		Oktober				Jan-Feb				Mar-April				Mei				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■	■	■	■	■	■	■												
4	Revisi Kuisisioner												■												
5	Rekomendasi Survey															■									
6	Survey Lapangan															■									
7	Analisis Data															■									
8	Penyusunan Hasil Laporan Penelitian (Skripsi)															■	■								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																		■	■	■				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																			■	■				
11	Revisi Skripsi																						■	■	
12	Penggandaan Skripsi																								■

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

## **I. Sistematika Laporan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan antara bab satu dengan bab yang lainnya saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya tersebut ialah sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Berancah

##### 1. Sejarah Pembentukan Desa Berancah

Desa Berancah adalah Desa pemekaran dari Desa Selatbaru yang dimekar bersamaan dengan 14 Desa Pemekaran lainnya Se-Kecamatan Bantan pada tahun 2012 yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembang Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan, yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 2012 dan diresmikan oleh bapak Bupati Bengkalis ( H.Herliyan Saleh, MSc ) bersamaan dengan 14 Desa di Kecamatan Bantan bertempat di halaman Mesjid Jamiun Nurul Islam Desa Resam Lapis, pada tanggal 18 Desember 2013 dan sekaligus dilantik Penjabat Kepala Desa Berancah Pertama yaitu bapak Dady Azral, S.Pi sampai dilantiknya Kepala Desa Berancah definitive Turadi, A.Md pada tanggal 28 Agustus 2017.

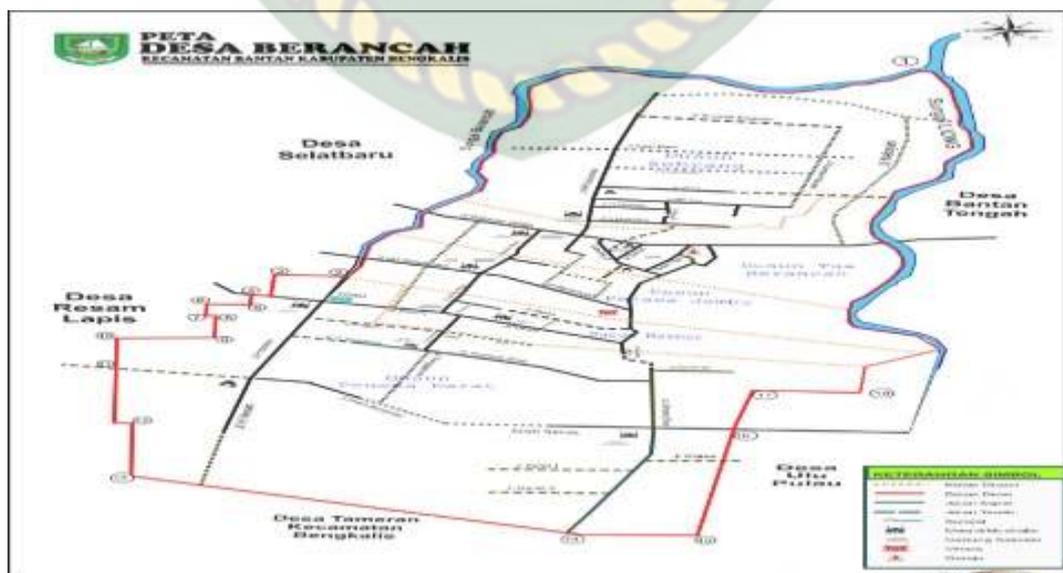
Sedangkan Nama “BERANCAH” itu sendiri merupakan nama salah satu Dusun, dari (3) tiga Dusun yang ada di wilayah Desa Berancah pada waktu itu, yaitu Dusun Berancah, Dusun Penawa Darat dan Dusun Makmur. Nama Dusun Berancah Diambil karena menurut sejarah, awal mula dari dua dusun lainnya

adalah Dari Pemekaran Dusun Berancah, yang mana pada waktu itu Dusun Berancah di mekarkan menjadi dua Dusun yaitu Dusun Berancah dan Dusun Penawa Darat, Lalu Kemudian beberapa tahun berlalu Dusun Penawa Darat di mekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Dusun Yaitu Dusun Penawa Darat dan Dusun Makmur. Hingga saat ini, setelah pemekaran Desa, Dusun-dusun juga di mekarkan lagi menjadi 5 Dusun.Yakni Dusun Penawa Darat, Dusun Penowo Makmur, Dusun Penawa Jambu, Dusun Berancah, dan Dusun Seberang.

## 2. Kondisi Umum Desa Berancah

Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak di  $110^{\circ} 48' 55,12''$  BT dan terletak di  $7^{\circ} 02' 27,52''$  LS. Secara topografi Desa Berancah termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 10$  meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut ini.

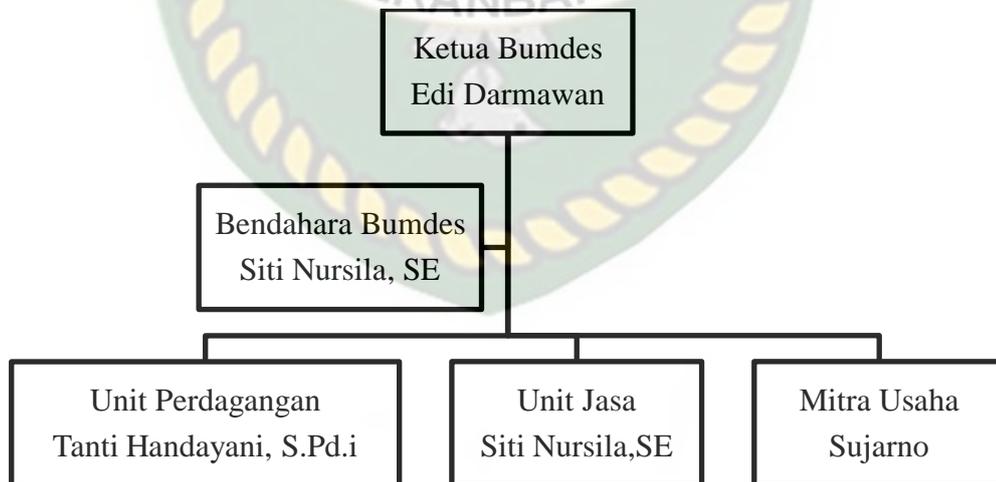
Gambar IV.1 Desa Berancah



### 3. Profil Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri

Pada penelitian ini BUMDes yang diteliti bernama Mutiara Mandiri yang berada di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun kepala desa dipimpin oleh Daddy Azral, S.Pi yang menjabat pada tahun 2015 hingga saat ini. Desa Berancah memiliki luas kurang lebih 2.500 Ha. BUMDes Mutiara Mandiri beralamat di Jalan Bambu Raya. Badan Usaha Milik Desa dibentuk pada tanggal 09 November 2015 Menurut Musyawarah Desa. Badan Usaha Milik Mutiara Mandiri juga memiliki berbagai jenis usaha diantaranya Perdagangan dan Jasa Pelayanan Masyarakat, Mitra Usaha Perdagangan, Mitra Usaha UMKM, Unit Simpan Pinjam, Toko Pangan Kita, Unit Perbengkelan Las. Pada tanggal 16 Desember 2015 di bentuknya suatu Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Mutiara Mandiri dan dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.2 : Bagan Struktur Organisasi



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Peneliti menggunakan sensus sampling dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa lapisan masyarakat seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, Kepala Unit Perdagangan, Unit Jasa, Mitra Usaha, Staf Administrasi dan 30 orang masyarakat yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling.

Kemudian, berikut ini akan dijabarkan mengenai karakteristik responden penelitian ini dimana peneliti telah memberikan beberapa klasifikasi yang dapat diisi oleh responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai data identitas responden akan dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

##### 1. Karakteristik Berdasarkan Usia

**Tabel V.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 - 30 Tahun	17	44.73%
2	31 - 40 Tahun	9	23.68%
3	41 - 50 Tahun	12	31.57%
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa total responden pada penelitian ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari bermacam jabatan dan profesi dimana peneliti telah mengklasifikasikan beberapa usia responden menjadi 3 kategori agar lebih mudah dalam mempresentasikannya. Pada rentang usia 20-30 Tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 44.73%. selanjutnya pada rentang usia 31-40 Tahun ada sebanyak 9 orang dengan persentase 23.68%. kemudian pada rentang usia 41-50 Tahun terdapat sebanyak 12 orang responden atau dengan persentase sebesar 31.57%, jadi dapat disimpulkan bahwa yang lebih dominan menjadi responden pada penelitian ini adalah rata-rata berusia 20-30 Tahun.

## 2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel V.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	28	73.68%
2	Perempuan	10	26.32%
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa total responden pada penelitian ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari bermacam jabatan dan profesi dimana terdapat 28 orang yang berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 73.68% dan perempuan sebanyak 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang lebih dominan menjadi responden pada penelitian ini adalah laki-laki dengan persentase sebesar 73.68%.

### 3. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel V.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	1	2.63%
2	SLTP Sederajat	9	23.68%
3	SLTA Sederajat	17	44.73%
4	Diploma	2	5.26%
5	S1	9	23.68%
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat diketahui bahwa total responden pada penelitian ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari beragam tingkat pendidikan. Pada klasifikasi ini peneliti menemukan tingkat pendidikan responden yang dibagi menjadi 5 klasifikasi utama, seperti terdapat 1 orang responden yang hanya tamatan SD atau ada 2.63% responden yang tamat SD. Selanjutnya, sebanyak 9 orang lainnya adalah tamatan SLTP sederajat dengan persentase 23.68%. terdapat 17 orang tamatan SLTA sederajat dengan persentase 44.73%. kemudian ada 2 orang yang memiliki riwayat pendidikan diploma dengan persentase 5.26% dan 9 orang lainnya adalah tamatan sarjana atau S1 dengan persentase 23.68%.

Berdasarkan hal tersebut, responden dengan riwayat pendidikan SLTA sederajatlah yang lebih banyak mendominasi pada penelitian ini dimana mereka yang terdiri dari persentase 44.73% ini memang sedang menjalani usaha untuk meningkatkan perekonomiannya, rata-rata responden tersebut terdiri dari lapisan masyarakat yang berwirausaha dan memiliki pekerjaan yang mengandalkan Badan Usaha Milik Desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka.

#### 4. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel V.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	8	26.66 %
2	Buruh Tani	2	6.66 %
3	Pegawai (PNS)	1	3.33 %
4	Pedagang Kelontong	1	3.33 %
5	Nelayan	1	3.33 %
6	Montir	1	3.33 %
7	Guru swasta	2	6.66 %
8	Pedagang Keliling	2	6.66 %
9	Pembantu Rumah Tangga	2	6.66 %
10	Wiraswasta	1	3.33 %
11	Belum bekerja	1	3.33 %
12	Pelajar	1	3.33 %
13	IRT	2	6.66 %
14	Buruh Harian Lepas	1	3.33 %
15	Sopir	1	3.33 %
16	Tukang Jahit	1	3.33 %
17	Karyawan honorer	1	3.33 %
18	Tukang Kayu	1	3.33 %
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan tentang karakteristik responden berdasarkan status pekerjaannya, adapun peneliti menemukan 10 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat atau responden yang menjadi responden pada penelitian ini. Sebanyak 8 orang bekerja sebagai Petani dengan persentase 26.66%, 2 orang sebagai Buruh Tani atau 6.66%, ada 1 orang PNS dengan persentase 3.33%, 1 orang pedagang barang kelontong dengan persentase 3.33%. nelayan 1 orang dengan persentase 3.33 %. Montir 1 orang dengan persentase 3.33%. guru swasta 2 orang dengan persentase 6.66 %. Pedagang keliling 2 orang dengan persentase 6.66 %, pembantu rumah tangga 2 orang dengan persentase 6.66%. wiraswasta 1 orang dengan persentase 3.33%. belum bekerja 1 orang dengan persentase 3.33%. pelajar 1 orang dengan persentase 3.33%. IRT 2 orang dengan persentase 6.66%. buruh harian lepas 1 orang dengan persentase 3.33%. sopir 1 orang dengan persentase 3.33%. tukang jahit d1 orang dengan persentase 3.33%. karyawan honorer 1 orang dengan persentase 3.33%. dan tukang kayu 1 orang dengan persentase 3.33%. berdasarkan keberagaman pekerjaan tersebut, yang lebih mendominasi pada penelitian ini yaitu responden dengan status pekerjaan sebagai buruh petani.

Setelah mendapatkan karakteristik responden pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat Desa Berancah terutama yang menjadi responden pada penelitian ini, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada penjabaran angket atau kuesioner untuk melihat lebih lanjut mengenai bagaimana persepsi mereka yang menjadi responden terhadap peranan

BUMdes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Berancah tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dibahas melalui sub bab berikut.

**B. Hasil Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Pada dasarnya Badan usaha milik desa merupakan badan usaha masyarakat yang siap sama-sama menggali segala potensi yang ada guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat perdesaan dan umumnya membantu dalam program peningkatan ekonomi nasional.

Badan usaha milik desa memiliki suatu peranan terhadap masyarakat desa guna untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini peneliti meminta persepsi masyarakat yang menjadi responden dan beberapa perangkat desa yang telah disebutkan untuk memberikan tanggapan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat
2. Meningkatkan Kreativitas dan Peluang Ekonomi Produktif
3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat

Dalam penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penelitian, agar dapat dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

#### **1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat**

Bentuk usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis saat ini adalah Simpan Pinjam. Simpan Pinjam Tunas Jaya dibentuk melalui Musyawarah Desa pada tanggal 06 Oktober 2015 di Kantor Desa Berancah, yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Koordinator Kecamatan, Pendamping Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah tugas utama dari BUMDes yaitu mendorong untuk berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakatnya seperti contoh dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya, meningkatkan penghasilan masyarakatnya dan memberikan modal usaha. Untuk melihat sejauh mana peranan BUMDes Desa Berancah mengenai hal tersebut, peneliti telah menjabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**a. Meningkatkan Usaha Ekonomi**

Salah satu tugas BUMDes yaitu untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui upaya dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya. Artinya, bagaimana suatu kemampuan atau aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dalam pengelolaan usaha dibidang perdagangan dan pertanian agar mampu mengembangkan diri melalui inovasi-inovasi berorientasi pada kebutuhan kelompok usaha masyarakat. Untuk lebih lanjut mengenai persepsi responden akan hal tersebut sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Meningkatkan masyarakat dalam bidang usaha ekonomi	18	47.36	19	50	1	2.64	100%
2	Memaksimalkan peningkatan usaha bagi masyarakat	8	21.05	28	73.69	2	5.26	100%
3	Melakukan optimalisasi terhadap usaha masyarakat yang tidak mampu	15	39.47	15	39.47	8	21.06	100%
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>		<b>62</b>		<b>11</b>		<b>258</b>
<b>Total</b>		<b>123</b>		<b>124</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>75.43%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 1a yaitu bagaimana peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan masyarakat dalam bidang usaha ekonomi dapat

diperoleh bahwa 18 orang mengatakan berperan atau sebesar 47.36%. selanjutnya ada 19 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 50% dan 1 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 2.64%.

Selanjutnya, pada item 1b dengan indikator pertanyaan tentang seperti apa upaya BUMDes Desa Berancah untuk memaksimalkan peningkatan usaha bagi masyarakatnya yaitu 8 orang mengatakan berperan dengan persentase 21.05%, 28 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 73.69% dan ada 2 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 5.26%.

Kemudian pada indikator 1c yaitu tentang solusi dari BUMDes dalam melakukan optimalisasi terhadap usaha masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 15 orang mengatakan berperan dengan persentase 39.47%, 15 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 39.47% dan 8 orang mengatakan kurang berperandengan persentase 21.06% . Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam meningkatkan usaha ekonomi yaitu sebesar 75.43% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 67 – 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya telah berperan. Artinya, BUMDes dalam hal ini banyak memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakatnya.

**b. Meningkatkan Penghasilan Masyarakat**

Meningkatkan penghasilan masyarakat adalah meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi suatu kerjanya selama satu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban responden tentang hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat	18	47.36	14	36.84	6	15.79	100%
2	Menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat	14	36.85	20	52.63	4	10.52	100%
3	Memberikan upah terhadap pegawainya	13	34.21	19	50	6	15.79	100%
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>		<b>53</b>		<b>16</b>		<b>252</b>
<b>Total</b>		<b>135</b>		<b>106</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>73.68%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat beragam jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Pada pertanyaan pertama yaitu tentang apakah BUMDes telah berperan dalam memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya, jawaban yang diperoleh yaitu sebanyak 18 orang mengatakan atau sebesar 47.36% mengatakan berperan, 14 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 36.84% dan 6 orang lainnya mengatakan kurang berperan dengan persentase 15.79%.

Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana langkah BUMDes dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakatnya yaitu sebanyak 14 orang mengatakan telah berperandengan persentase 36.85% , 20 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 52.63% dan 4 orang lainnya mengatakan kurang berperandengan persentase 10.52%. Kemudian pada indikator ketiga yaitu tentang apakah BUMDes telah berperan aktif dalam memberikan upah terhadap pegawainya diperoleh hasil mengatakan bahwa 13 orang berperan dengan persentase 34.21%, kemudian sebanyak 20 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 50% dan 6 orang lainnya atau sebesar 15.79% mengatakan kurang berperan.

Setelah memperoleh hasil tersebut, kemudian peneliti melakukan rekapitulasi mengenai jawaban keseluruhan tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan penghasilan masyarakat yaitu diperoleh hasil sebesar 75.43% yang dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes telah berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakatnya.

#### **c. Memberikan Modal Usaha**

Memberikan bantuan modal usaha adalah memberikan penguatan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat diperdesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.7 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Memberikan Modal Usaha**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat	14	36.84	15	39.47	9	23.69	100%
2	Menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat	17	44.74	12	31.58	9	23.68	100%
<b>Jumlah</b>		<b>165</b>		<b>27</b>		<b>18</b>		<b>165</b>
<b>Total</b>		<b>93</b>		<b>54</b>		<b>18</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>72.36%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hal diatas, dapat ditemukan hasil mengenai indikator pertama yaitu tentang bagaimana peran BUMDes dalam memberikan modal usaha bagi pelaku ekonomi di Desa Beranchah dengan jawaban sebanyak 14 orang mengatakan berperan dengan persentase 36.84% , 15 orang mengatakan cukup berperan dan 9 orang lainnya mengatakan kurang berperandengan persentase 23.69% . Begitu juga dengan indikator kedua bahwa sebanyak 17 orang mengatakan berperan atau dengan persentase 44.73%, 12 orang lainnya mengatakan cukup berperan atau sebanyak 31.58% dan sisanya mengatakan kurang berperan atau sebanyak 23.68%.

Setelah memperoleh hasil tersebut, kemudian peneliti melakukan rekapitulasi mengenai jawaban keseluruhan tentang peranan BUMDes dalam memberikan modal usaha yaitu diperoleh hasil sebesar 72.36% yang dapat

disimpulkan bahwa peranan BUMDes telah berperan dalam meningkatkan penghasilan masyarakatnya melalui dengan pemberian modal usaha.

## 2. Meningkatkan Kreativitas dan Peluang Ekonomi Produktif

Selain mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat, peranan Badan Usaha Milik Desa lainnya yaitu meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi yang produktif maka dari itu Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai pelopor terbentuknya usaha-usaha masyarakat yang baru, seperti:

### a. Membentuk Usaha-usaha Baru

Membentuk usaha-usaha baru adalah membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan moda, ide dan manajemen yang dirancang sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.8 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Membentuk Usaha-usaha Baru**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Memberikan modal usaha bagi pelaku ekonomi	9	23.68	21	55.27	8	21.05	100%
2	Mempermudah pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya	8	21.05	22	57.90	8	21.05	100%
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>		<b>43</b>		<b>16</b>		<b>153</b>
<b>Total</b>		<b>51</b>		<b>86</b>		<b>16</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>67.10%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 1a yaitu bagaimana langkah BUMDes dalam

memberikan peluang kepada masyarakat agar masyarakat bisa membentuk suatu usaha baru dapat diperoleh bahwa 9 orang mengatakan berperan atau sebesar 23.68%. selanjutnya ada 21 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 55.27% dan 8 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 21.05%.

Selanjutnya, pada item 1b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana potensi sumber daya ekonomi dapat dikembangkan oleh BUMDes dalam rangka pembentukan usaha milik rakyat yaitu 8 orang mengatakan berperan dengan persentase 21.05%, 22 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 57.90% dan ada 8 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 21.05%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam meningkatkan usaha ekonomi yaitu sebesar 67.10% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 67 – 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya telah berperan. Artinya, BUMDes dalam hal ini banyak memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakatnya.

#### **b. Memberikan Pelatihan Kepada Masyarakat**

Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel V.9 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Memberikan Pelatihan Kepada Masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa Berancah	2	5.26	18	47.37	18	47.37	100%
2	Mengembangkan usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya	3	7.90	21	55.26	14	36.84	100%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>		<b>39</b>		<b>32</b>		<b>125</b>
<b>Total</b>		<b>15</b>		<b>78</b>		<b>32</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>54.82%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 2a yaitu bagaimana langkah BUMDes dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa Berancah dapat diperoleh bahwa 2 orang mengatakan berperan atau sebesar 5.26%. selanjutnya ada 18 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 47.37% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Selanjutnya, pada item 2b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana kebijakan dan strategi BUMDes dalam mengembangkan usaha ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan yaitu 3 orang mengatakan berperan dengan persentase 7.90%, 21 orang lainnya mengatakan cukup berperan dan ada 14 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 36,84%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat

yaitu sebesar 54.82% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat cukup berperan. Artinya, pihak BUMDes perlu mengencangkan kembali mengenai sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat setempat dan sering memberikan *workshop* kepada masyarakat untuk membuka usaha baru.

### c. Mengurangi Angka Pengangguran

Menciptakan suatu lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran di usia muda. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut yang akan dijelaskan secara rinci:

**Tabel V.10 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mengurangi Angka Pengangguran**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Menanggulangi solusi angka pengangguran di Desa Berancah	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
2	Mengurangi angka pengangguran di Desa Berancah	1	2.63	8	21.05	29	76.32	100%
3	Menekan angka pengangguran di Desa Berancah	2	5.26	23	60.53	13	34.21	100%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>		<b>48</b>		<b>60</b>		<b>125</b>
<b>Total</b>		<b>18</b>		<b>96</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>36.54%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 3a yaitu bagaimana evaluasi kebijakan BUMDes dalam menanggulangi solusi angka pengangguran di Desa Berancah dapat diperoleh bahwa 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Selanjutnya, pada item 3b dengan indikator pertanyaan tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Desa Berancah yaitu 1 orang mengatakan berperan dengan persentase 2.63%, 8 orang lainnya mengatakan cukup berperan dan ada 29 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 76.32%.

Kemudian pada indikator 3c yaitu tentang bagaimana program BUMDes dalam menekan angka pengangguran di Desa Berancah. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh 2 orang mengatakan berperan, 23 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 5.26% dan 13 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 34.21%. Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam mengurangi angka pengangguran yaitu sebesar 36,54% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya cukup berperan. Artinya, BUMDes dalam hal ini perlu meningkatkan kembali dan mengevaluasi bagaiman cara atau strategi untuk menekan angka pengangguran di

Desa Berancah yang terbukti bahwa banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengembangkan usahanya.

### 3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal

Peranan Badan Usaha Milik Desa yang lainnya adalah mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa ini juga memiliki peran sebagai solusi dari masyarakat seperti:

#### a. Mengatasi Solusi Masalah Rentenir

Usaha mikro sektor informal pada pola kegiatannya tidak teratur dalam antrian baik waktu, permodalan maupun penerimaan tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang di tetapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.11 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mengatasi Masalah Rentenir**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Solusi dalam mengatasi masalah rentenir	17	44.74	12	31.58	9	23.68	100%
2	Melepaskan masyarakat dari adanya rentenir	3	7.90	21	55.26	14	36.84	100%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>		<b>33</b>		<b>23</b>		<b>149</b>
<b>Total</b>		<b>60</b>		<b>66</b>		<b>23</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>65.35%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 1a yaitu bagaimana solusi yang diberikan BUMDes dalam mengatasi masalah rentenir dapat diperoleh bahwa 17 orang mengatakan berperan atau sebesar 44.74%. selanjutnya ada 12 orang lainnya mengatakan

cukup berperan dengan persentase 31.58% dan 9 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 23.68%.

Selanjutnya, pada item 1b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana solusi yang diberikan BUMDes dalam melepaskan masyarakat dari adanya rentenir yaitu 3 orang mengatakan berperan dengan persentase 7.90%, 21 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 55.26% dan ada 14 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 36.84%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam mengatasi masalah rentenir yaitu sebesar 65.35% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya salah satunya dalam mengatasi permasalahan rentenir yaitu cukup berperan. Artinya, BUMDes harus berkontribusi dengan pemerintah desa untuk menekan permasalahan rentenir yang mana sampai saat ini belum ada solusi yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut dikarenakan dengan besarnya kebutuhan masyarakat untuk meminjam uang kepada rentenir yang dianggap merupakan solusi pintas daripada harus merasakan urusan yang panjang dengan BUMDes.

#### **b. Mendorong Masyarakat dalam Menciptakan Usaha Baru**

Menyediakan atau memberikan modal kepada masyarakat untuk menunjang dalam hal menciptakan usaha baru agar dapat bersaing dalam dunia pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel V.12 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Masyarakat dalam Menciptakan Usaha Baru**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Berperan aktif dalam menciptakan usaha kecil dan menengah (UKM)	3	7.90	17	44.73	18	47.37	100%
2	Usaha yang diberikan Badan Usaha Milik Desa	1	2.63	8	21.05	29	76.32	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>		<b>25</b>		<b>47</b>		<b>109</b>
<b>Total</b>		<b>12</b>		<b>50</b>		<b>47</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>47.80%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 2a yaitu apakah BUMDes telah berperan aktif dalam menciptakan usaha kecil dan menengah yang diperoleh hasil jawaban yaitu sebanyak 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.90%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.73% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Selanjutnya, pada item 2b dengan indikator pertanyaan apakah usaha yang diberikan oleh BUMDes sudah berperan terhadap masyarakat setempat yaitu 1 orang mengatakan berperan dengan persentase 2.63%, 8 orang lainnya mengatakan cukup berperandengan persentase 21.05% dan ada 29 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 76.32%.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam mendorong masyarakat dalam menciptakan usaha baru yaitu sebesar 47.80% yang jika dibandingkan dengan

teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam mendorong masyarakat dalam menciptakan usaha baru cukup berperan.

**c. Memberikan Bantuan Usaha Modal**

Memberikan bantuan modal usaha adalah suatu badan atau instansi masyarakat yang telah berperan dalam memberikan suatu modal usaha dalam bentuk modal usaha simpan pinjam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel V.13 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Memberikan Bantuan Usaha Modal**

No	Item Penilaian Indikator	Berperen		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Mendorong masyarakat untuk memberikan suatu pinjaman terhadap masyarakat	2	5.26	23	60.53	13	34.21	100%
2	Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Direksi Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat	7	18.42	27	71.05	4	10.53	100%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>		<b>50</b>		<b>17</b>		<b>144</b>
<b>Total</b>		<b>27</b>		<b>100</b>		<b>17</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>63.15%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 3a yaitu bagaimana peran BUMDes dalam mendorong masyarakat untuk memberikan suatu pinjaman terhadap masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha dapat diperoleh bahwa 2 orang

mengatakan berperan atau sebesar 5.26%. selanjutnya ada 23 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 60.53% dan 13 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 34.21%.

Selanjutnya, pada item 3b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Direksi BUMDes dengan masyarakat mengenai modal usaha yaitu 7 orang mengatakan berperan dengan persentase 18.42%, 27 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 71.05% dan ada 4 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 10.53%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam memberikan bantuan usaha modal yaitu sebesar 63.15% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam memberikan bantuan usaha modal cukup berperan.

#### **4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Badan Usaha Milik Desa juga memiliki peranan penting yaitu meningkatkan pendapatan asli desanya sendiri. Untuk itu Badan Usaha Milik Desa dituntut untuk dapat membentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun desa, seperti:

##### **a. Membuat Program Kegiatan Pembangunan Desa**

Suatu program pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan perdesaan yang mencakup struktur demografi

masyarakat pola kegiatan usaha pertanian dan pola keterkitan ekonomi desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.14 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Membuat Program Kegiatan Pembangunan Desa**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha	3	7.90	21	55.26	14	36.84	100%
2	Berperan dalam terbentuknya kegiatan pembangunan desa	3	7.90	17	44.73	18	47.37	100%
3	Mengklasifikan jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usahanya	1	2.63	8	21.05	29	76.32	100%
4	Kegiatan usaha dibidang pertanian di Badan Usaha Milik Desa sudah berperan aktif	2	5.26	23	60.53	13	34.21	100%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>		<b>48</b>		<b>60</b>		<b>125</b>
<b>Total</b>		<b>18</b>		<b>96</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>27.41%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 1a yaitu bagaimana Badan Usaha Milik Desa dalam menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha atau bisnis dapat diperoleh bahwa 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.90%. selanjutnya ada 21 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan

persentase 55.26% dan 14 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 36.84%.

Selanjutnya, pada item 1b dengan indikator pertanyaan apakah Badan Usaha Milik Desa Berancah telah berperan dalam terbentuknya kegiatan pembangunan desa yaitu 3 orang mengatakan berperan dengan persentase 7.90%, 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.73% dan ada 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Kemudian pada indikator 1c yaitu tentang bagaimana langkah Badan Usaha Milik Desa dalam mengklasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usahanya. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 1 orang mengatakan berperandengan persentase 2.63% , 8 orang lainnya mengatakan cukup berperandengan persentase 21.05% dan 29 orang mengatakan kurang berperandengan persentase 76.32% . Pada intikator 1d yaitu apakah kegiatan usaha dibidang pertanian di Badan Usaha Milik Desa sudah berperan aktif dimasyarakat desa berancah diperoleh hasil yaitu 2 orang dengan persentase 5.26% mengatakan berperan, 23 orang lainnya dengan persentase 60.53% mengatakan cukup berperan dan 13 orang lainnya atau setara dengan 34.21% mengatakan kurang berperan.

Berdasarkan keempat hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam membuat program kerja mengenai kegiatan pembamgunan desa yaitu sebesar 27.41% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 0 – 32% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes

Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya kurang berperan. Artinya, masih banyak hal yang menjadi perhatian khusus bagi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi kendala bagi BUMDes untuk melaksanakan kegiatan hal tersebut.

**b. Bertambahnya Kas Desa**

Bertambahnya uang desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa atau perolehan hak yang sah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.15 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Bertambahnya Kas Desa**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Badan Usaha Milik Desa dalam menginformasikan kas desa	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
2	Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kas desa	1	2.63	8	21.05	29	76.32	100%
3	Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Berancah	1	2.63	24	63.16	13	34.21	100%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>		<b>49</b>		<b>60</b>		<b>124</b>
<b>Total</b>		<b>15</b>		<b>98</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>36.25 %</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 2a yaitu bagaimana transparansi yang diberikan

Badan Usaha Milik Desa dalam menginformasikan kas desa dapat diperoleh bahwa 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Selanjutnya, pada item 2b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana putaran keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kas desa yaitu 1 orang mengatakan berperan dengan persentase 2.63%, 8 orang lainnya mengatakan cukup berperandengan persentase 21.05% dan ada 29 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 76.32%.

Kemudian pada indikator 2c yaitu tentang solusi dari BUMDes dalam melakukan optimalisasi terhadap usaha masyarakat yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 1 orang mengatakan berperandengan persentase 2.63% , 24 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 63.16% dan 13 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 34.21%. Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam meningkatkan usaha ekonomi yaitu sebesar 36.25% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya telah cukup berperan.

### c. Meningkatkan Perekonomian Desa

Meningkatkan perekonomian desa adalah solusi efektif untuk mengurangi keinginan masyarakat desa untuk mengupayakan program ekonomi desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.16 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Badan Usaha Milik Desa Kepada masyarakat Desa Berancah dalam meningkatkan perekonomian desa	3	7.89	16	42.11	19	50	100%
2	Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan usaha perekonomian masyarakat Desa Berancah	5	13.15	18	47.37	15	39.48	100%
3	Mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lebih efektif	2	5.26	35	92.11	1	2.63	100%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>		<b>69</b>		<b>35</b>		<b>179</b>
<b>Total</b>		<b>30</b>		<b>138</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>52.33%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 3a yaitu bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Kepada masyarakat Desa Berancah dalam meningkatkan perekonomian desa dapat diperoleh bahwa 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 16 orang lainnya mengatakan cukup berperan

dengan persentase 42.11% dan 19 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 50%.

Selanjutnya, pada item 3b dengan indikator pertanyaan bagaimana pengawasan dari Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan usaha perekonomian masyarakat Desa Berancah yaitu 5 orang mengatakan berperan dengan persentase 13.15%, 18 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 47.37% dan ada 15 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 39.48%.

Kemudian pada indikator 3c yaitu tentang bagaimanakah upaya Badan Usaha Milik Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar menjadi lebih efektif dalam menghimpun unit desanya. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 2 orang mengatakan berperan dengan persentase 5.26%, 35 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 92.11% dan 1 orang mengatakan kurang berperandengan persentase 2.63% . Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam meningkatkan usaha ekonomi yaitu sebesar 52.33% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 67 – 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya cukup berperan.

## 5. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat

Poin peranan selanjutnya yang wajib dilaksanakan oleh BUMD adalah menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa. Untuk itu, BUMD wajib membantu masyarakat dalam hal modal usaha dan lain sebagainya, seperti:

### a. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Desa

Perekonomian yang di selenggarakan oleh BUMDES untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.17 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Desa**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Meningkatkan modal usaha masyarakat Desa Berancah	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
2	Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam pusat pelayanan perekonomian masyarakatnya	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
3	Hal-hal yang telah disiapkan dan disusun oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam program kerja	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>		<b>51</b>		<b>54</b>		<b>140</b>
<b>Total</b>		<b>27</b>		<b>102</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>40.93%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 1a yaitu bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan modal usaha masyarakat Desa Berancah dapat diperoleh bahwa 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Selanjutnya, pada item 1b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana potensi berdirinya Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam pusat pelayanan perekonomian masyarakatnya yaitu 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%.

Kemudian pada indikator 1c yaitu tentang apa saja hal-hal yang telah disiapkan dan disusun oleh Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam program kerja mengenai pusat pelayanan perekonomian masyarakatnya. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 3 orang mengatakan berperan atau sebesar 7.89%. selanjutnya ada 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 47.37%

Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yaitu sebesar 40.93% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya cukup berperan.

**b. Membantu Masyarakat dalam Memperoleh Barang**

Suatu objek atau jasa yang memiliki nilai suatu barang dan mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V.18 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Membantu Masyarakat dalam Memperoleh Barang**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Berperan dalam menciptakan pasar bagi masyarakat	2	5.26	23	60.53	13	34.21	100%
2	Kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam membantu masyarakat	3	7.90	21	55.26	14	36.84	100%
3	Menentukan kewenangan yang berskala di bidang pemerintahan desa	3	7.89	17	44.74	18	47.37	100%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>		<b>61</b>		<b>45</b>		<b>157</b>
<b>Total</b>		<b>24</b>		<b>122</b>		<b>11</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>45.90%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 2a yaitu apakah Badan Usaha Milik Desa Berancah telah berperan dalam menciptakan pasar bagi masyarakat dapat diperoleh bahwa 2 orang mengatakan berperan atau sebesar 5.26%. selanjutnya ada 23 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 60.53% dan 13 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 34.21%.

Selanjutnya, pada item 2b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam membantu masyarakat dalam memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yaitu 3 orang mengatakan berperan dengan persentase 7.90%, 21 orang lainnya mengatakan cukup berperan dan ada 14 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 36.84%.

Kemudian pada indikator 2c yaitu tentang bagaimana langkah penetapan Badan Usaha Milik Desa dalam menentukan kewenangan yang berskala di bidang pemerintahan desa. Jawaban responden mengenai hal tersebut diperoleh sebagaimana 3 orang mengatakan berperandengan persentase 7.89% , 17 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 44.74% dan 18 orang mengatakan kurang berperandengan persentase 47.37% . Berdasarkan ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam membantu masyarakat dalam memperoleh barang yaitu sebesar 45.90% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya cukup berperan.

### **c. Menyeimbangkan Harga Pasar**

Harga yang terbentuk dalam titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.19 : Jawaban Responden tentang Peranan BUMDes dalam Menyeimbangkan Harga Pasar**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Badan Usaha Milik Desa sebagai pusat pelayanandalam memberikan barang dan jasa	1	2.63	8	21.05	29	76.32	100%
2	Badan Usaha Milik Desa dengan menyeimbangkan harga pasar	2	5.26	23	60.53	13	34.21	100%
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>		<b>31</b>		<b>42</b>		<b>113</b>
<b>Total</b>		<b>9</b>		<b>62</b>		<b>42</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>49.56%</b>

*Sumber:* Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang pertanyaan 3a yaitu bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa sebagai pusat pelayanandalam memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasardapat diperoleh bahwa 1 orang mengatakan berperan atau sebesar 2.63%. selanjutnya ada 8 orang lainnya mengatakan cukup berperan dengan persentase 21.05% dan 29 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 76.32%.

Selanjutnya, pada item 2b dengan indikator pertanyaan tentang bagaimana kebijakan harga yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan menyeimbangkan harga pasar dengan kebutuhan masyarakat Desa Berancah yaitu 2 orang mengatakan berperan dengan persentase 5.26%, 23 orang lainnya

mengatakan cukup berperan dengan persentase 60.53% dan ada 13 orang mengatakan kurang berperan dengan persentase 34.21%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan mengenai bagaimana peranan BUMDes secara keseluruhan dalam menyeimbangkan harga pasar yaitu sebesar 49.56% yang jika dibandingkan dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan yaitu berada pada kategori 33 – 66% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya cukup berperan. Artinya, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh pihak BUMDes dengan mengadakan koordinasi langsung dengan masyarakat setempat dengan para distributor lainnya agar dapat menyeimbangkan harga pasar, dan bila perlu BUMDes dapat memberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk berembuk demi menjaga kestabilan harga pasar.

**Tabel V.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat dalam item Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Meningkatkan Usaha Ekonomi	41	107.89	62	163.15	11	28.94	100%
2	Meningkatkan penghasilan masyarakat	45	118.42	53	139.47	16	42.10	100%
3	Memberikan modal usaha	31	81.57	27	71.05	18	47.36	100%
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>		<b>142</b>		<b>45</b>		<b>101</b>
<b>Total</b>		<b>39</b>		<b>47</b>		<b>15</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>29.53%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang indikator mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat dalam item meningkatkan usaha ekonomi dapat diperoleh bahwa 41 orang yang menjawab berperan atau sebesar 107.89% , selanjutnya 62 orang mengatakan cukup berperan dengan persentase 163.15%, dan yang lainnya mengatakan kurang berpera sebanyak 11 orang dengan persentase 28.94%

Selanjutnya pada item meningkatkan penghasilan masyarakat yaitu 45orang yang mengatakan berperan dengan persentase 45 orang dengan persentase 118.57%, selanjutnya 53 orang yang mengatakan cukup berperan dengan persentase 139.47% dan 16 orang yang mengtakan kurang berperan dengan persentase 42.10%.

Kemudian pada item memberikan modal usaha yaitu 31 orang yang menjawab berperan dengan persentase 81.57%, selanjutnya 27 orang yang menjawab cukup berperan dengan persentase 71.05%, dan 18 orang yang menjawab kurang berperan dengan persentase 47.36%.

Dari hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat yang paling banyak adalah pada item meningkatkan usaha ekonomi dan meningkatkan penghasilan masyarakat sebanyak 114 orang/responden, dan pada item memberikan modal usaha sebanyak 76 orang/responden.

**Tabel V.21 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat dalam item Meningkatkan Kreativitas dan Peluang ekonomi Produktif**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Membentuk usaha-usaha baru	17	44.73	43	113.15	16	42.10	100%
2	Memberikan pelatihan kepada masyarakat	5	13.15	39	102.63	32	84.21	100%
3	Mengurangi angka pengangguran	6	15.78	48	126.31	60	157.89	100%
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>		<b>130</b>		<b>108</b>		<b>798</b>
<b>Total</b>		<b>84</b>		<b>390</b>		<b>324</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>233.33%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang indikator meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif dalam item membentuk usaha-usaha baru dapat diperoleh bahwa 17 orang yang menjawab berperan atau sebesar 44.73% , selanjutnya 43 orang mengatakan cukup berperan dengan persentase 113.15%, dan yang lainnya mengatakan kurang berperan sebanyak 16 orang dengan persentase 42.10%

Selanjutnya pada item meningkatkan penghasilan masyarakat yaitu 45orang yang mengatakan berperan dengan persentase 5 orang dengan persentase 1 13.15%, selanjutnya 39 orang yang mengatakan cukup berperan dengan persentase 102.63% dan 32 orang yang mengtakan kurang berperan dengan persentase 84.21%.

Kemudian pada item memberikan modal usaha yaitu 6 orang yang menjawab berperan dengan persentase 15.78%, selanjutnya 48 orang yang

menjawab cukup berperan dengan persentase 126.31%, dan 60 orang yang menjawab kurang berperan dengan persentase 157.89%.

Dari hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi produktif yang paling banyak adalah pada item mengurangi angka pengangguran sebanyak 114 orang/responden, dan pada item membentuk usaha-usaha baru dan memberikan pelatihan kepada masyarakat ialah sebanyak 76 orang/responden.

**Tabel V.22 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat dalam item Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Mengatasi solusi masalah rentenir	20	52.63	33	86.84	23	60.52	100%
2	Mendorong masyarakat dalam menciptakan usaha baru	4	10.52	25	65.78	47	123.68	100%
3	Memberikan modal usaha	9	23.68	50	131.57	17	44.73	100%
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>		<b>108</b>		<b>87</b>		<b>684</b>
<b>Total</b>		<b>99</b>		<b>324</b>		<b>261</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>200%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang indikator mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dalam item mengatasi solusi masalah rentenir dapat diperoleh bahwa 20 orang yang menjawab berperan atau sebesar 52.63% , selanjutnya 33 orang mengatakan cukup berperan dengan persentase 86.84%, dan yang lainnya mengatakan kurang berperan sebanyak 23 orang dengan persentase 60.52%

Selanjutnya pada item mendorong masyarakat dalam menciptakan usaha baru yaitu 4 orang yang mengatakan berperan dengan persentase 10.52%, selanjutnya 25 orang yang mengatakan cukup berperan dengan persentase 65.78% dan 47 orang yang mengatakan kurang berperan dengan persentase 123.68%.

Kemudian pada item memberikan bantuan modal usaha yaitu 9 orang yang menjawab berperan dengan persentase 23.68%, selanjutnya 50 orang yang menjawab cukup berperan dengan persentase 131.57%, dan 17 orang yang menjawab kurang berperan dengan persentase 44.73%.

Dari hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal memiliki jumlah samasebanyak 76 orang/responden dalam 3 item.

**Tabel V.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat dalam item Meningkatkan Penghasilan Asli Desa**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Membuat program kegiatan pembangunan desa	9	23.68	69	181.57	75	197.36	100%
2	Bertambahnya kas desa	5	13.15	49	128.94	60	157.89	100%
3	Meningkatkan perekonomian desa	10	26.31	69	181.57	35	92.10	100%
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>		<b>187</b>		<b>170</b>		<b>1.143</b>
<b>Total</b>		<b>72</b>		<b>561</b>		<b>510</b>		
<b>Rata-rata</b>								<b>0.33%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang indikator meningkatkan pendapatan asli desa dalam item

membuat program kegiatan pembangunan desa dapat diperoleh bahwa 9 orang yang menjawab berperan atau sebesar 23.68% , selanjutnya 69 orang mengatakan cukup berperan dengan persentase 181.57%, dan yang lainnya mengatakan kurang berpera sebanyak 75 orang dengan persentase 197.36%

Selanjutnya pada item meningkatkan bertambahnya kas desa yaitu 45orang yang mengatakan berperan dengan persentase 5 orang dengan persentase 1 13.15%, selanjutnya 49 orang yang mengatakan cukup berperan dengan persentase 128.94% dan 60 orang yang mengtakan kurang berperan dengan persentase 157.89%.

Kemudian pada item meningkatkan perekonomian desa yaitu 10 orang yang menjawab berperan dengan persentase 26.31%, selanjutnya 69 orang yang menjawab cukup berperan dengan persentase 181.57%, dan 35 orang yang menjawab kurang berperan dengan persentase 92.10%.

Dari hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator meningkatkan pendapatan asli desa yang paling banyak adalah pada item membuat program kegiatan pembangunan desa sebanyak 153 orang/responden, dan pada item bertambahnya kas desa dan meningkatkan perekonomian desa sebanyak 114 orang/responden.

**Tabel V.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat dalam item Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat**

No	Item Penilaian Indikator	Berperan		Cukup Berperan		Kurang Berperan		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	
1	Sebagai pusat pelayanan ekonomi desa	9	23.68	51	134.21	54	142.10	100%
2	Membantu masyarakat dalam memperoleh barang	8	21.05	61	160.52	45	118.42	100%
3	Meyeimbangkan harga pasar	3	7.89	31	81.57	42	110.52	100%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>		<b>143</b>		<b>141</b>		
<b>Total</b>		<b>60</b>		<b>429</b>		<b>423</b>		<b>882</b>
<b>Rata-rata</b>								<b>257.89%</b>

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada persepsi responden penelitian tentang indikator sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat dalam item sebagai pusat pelayanan ekonomi desa dapat diperoleh bahwa 9 orang yang menjawab berperan atau sebesar 23.68% , selanjutnya 51 orang mengatakan cukup berperan dengan persentase 134.21%, dan yang lainnya mengatakan kurang berpera sebanyak 54 orang dengan persentase 142.10%

Selanjutnya pada item membantu masyarakat dalam memperoleh barang yaitu 8 orang yang mengatakan berperan dengan persentase persentase 21.05%, selanjutnya 61 orang yang mengatakan cukup berperan dengan persentase 160.52% dan 45 orang yang mengatakan kurang berperan dengan persentase 118.42%.

Kemudian pada item menyeimbangkan harga pasar yaitu 3 orang yang menjawab berperan dengan persentase 7.89%, selanjutnya 31 orang yang

menjawab cukup berperan dengan persentase 81.57%, dan 42 orang yang menjawab kurang berperan dengan persentase 110.52%.

Dari hasil rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat yang paling banyak adalah pada item sebagai pusat pelayanan ekonomi desa dan membantu masyarakat dalam memperoleh barang sebanyak 114 orang/responden, dan pada item menyeimbangkan harga pasar sebanyak 76 orang/responden.

### **C. Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Dalam pelaksanaan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ada beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi antara lain:

1. Kurangnya modal Badan Usaha Milik Desa Berancah sehingga masih banyak hal yang masih kurang, seperti dibatasinya jumlah anggota dan jumlah pinjaman.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam hal pengenalan akan unit usaha yang telah dijalankan. Hal ini terbukti dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Berancah.

3. Kurangnya ketegasan pengurus Badan Usaha Milik Desa Berancah dalam menjalankan fungsinya, karena terbukti masih ada anggota yang menunggak angsuran dalam waktu lama, dan belum mendapat tindakan tegas dari pihak Badan Usaha Milik Desa Berancah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran kuesioner pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang telah peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Peranan BUMDes dalam mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat telah terlaksana dengan baik atau dikategorikan sebagai berperan. Artinya, BUMDes dalam hal ini banyak memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakatnya.
2. Peranan BUMDes dalam meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakatnya cukup berperan. Artinya, BUMDes dalam hal ini perlu meningkatkan kembali dan mengevaluasi bagaimanacara atau strategi untuk menekan angka pengangguran di Desa Berancah yang terbukti bahwa banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengembangkan usahanya.
3. Peranan BUMDes dalam mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan BUMDes Desa Berancah dalam memberikan bantuan usaha modal cukup berperan. Artinya, masih banyak hal yang menjadi perhatian khusus bagi BUMDes

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi kendala bagi BUMDes untuk melaksanakan kegiatan hal tersebut.

4. Peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa cukup berperan. Artinya, masih banyak hal yang menjadi perhatian khusus bagi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi kendala bagi BUMDes untuk melaksanakan kegiatan hal tersebut.
5. Peranan BUMDes sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat cukup berperan. Artinya, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh pihak BUMDes dengan mengadakan koordinasi langsung dengan masyarakat setempat dengan para distributor lainnya agar dapat menyeimbangkan harga pasar, dan bila perlu BUMDes dapat memberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk berembuk demi menjaga kestabilan harga pasar.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan oleh peneliti terkait penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pihak BUMDes harus lebih gencar dalam mensosialisasikan mengenai pengembangan berwirausaha bagi masyarakat setempat agar perekonomian masyarakat terutama di Desa Berancah lebih meningkat.
2. Terkhusus bagi pengguna dana BUMDes sebaiknya dapat mengelolah dana tersebut sebaik mungkin dengan melihat situasi dan kondisi dalam menggunakan dana yang diperolehnya

3. Terkhusus juga bagi pihak BUMDes harus sering mengadakan kontroling dan sosialisasi sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik dalam menggunakan dana yang digulirnya kepada masyarakat pengguna dana BUMDes, khususnya masyarakat Desa Berancah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azam Awang, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berry, David 2000, *Ethic and Media Culture*, Focal Press. Oxford
- Keban, Y. T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Publik-Konsep, Teori dan isu*, Yogyakarta: Gava Mandiri.
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abdi Nugraha.
- Mubyarto, dkk, 2000. *Otonomi Masyarakat Desa: perspektif “Orang Daerah” dan “Orang Desa” di Enam Desa Jawa-Bali*. Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Nurman, M.Si., Ph.D. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Siagan, Sondang P , 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta,Bumi Aksara.
- Siswanto, B,2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Syafiie, inukencana, 2003.*SistemAdministrasi Negara*. Bandung, BumiAksara.
- Syafiie, InuKencana, 2010. *IlmuAdministrasiPublik*. Jakarta, PT. RinekaCipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *StudiTentangAdministrasiPublik*.Jatinangor, Erlangga.

Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Kencana.

Thoha, Mftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta, Kencana.

Voll, Willy D.S, 2013. *Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.

Wicaksono, Kristian Widya, 2014. *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bandung, Gava Media.

Zulkifli, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, UIR PRESS

Dokumentasi:

Buku Pedoman Penulisan 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

*Universitas Islam Riau*

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Nomor 47 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang: *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015 tentang: *Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Desa Berancah, nomor 03 Tahun 2015 tentang: *Pendirian Badan Usaha Milik Desa*

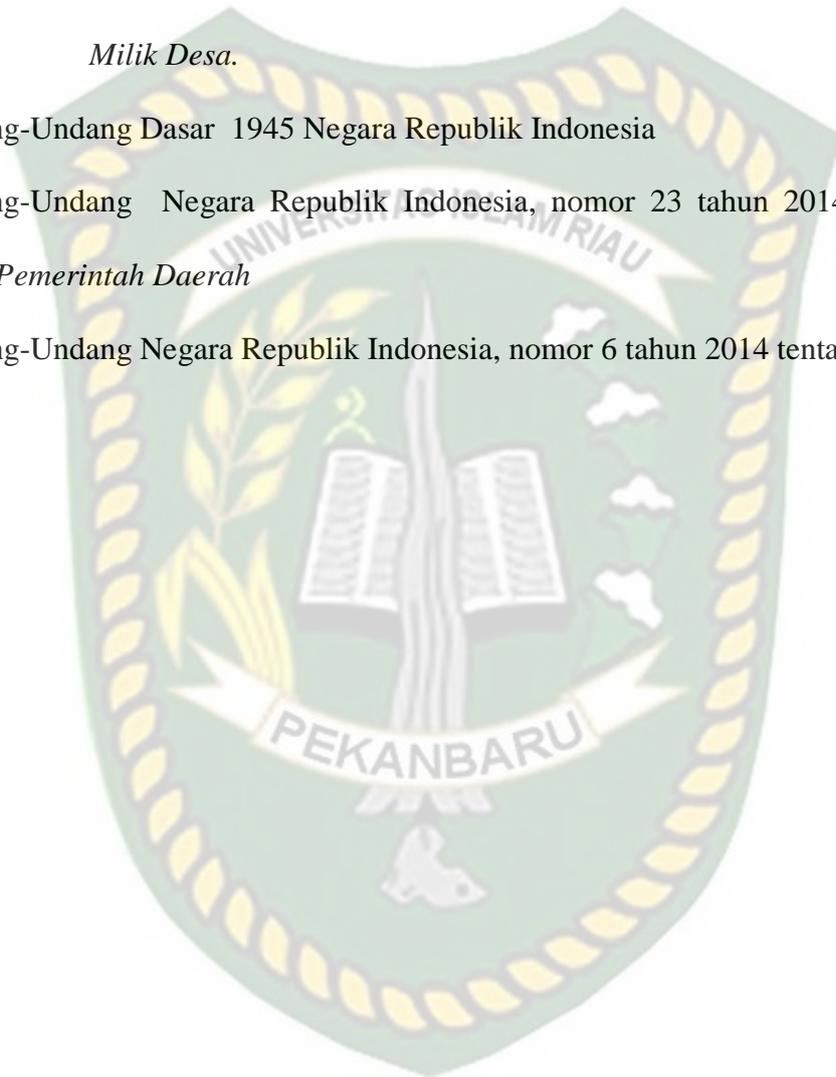
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, nomor 1 Tahun 2004 Tentang: *Tata Cara dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.*

Peraturan Desa Berancah, nomor 03 Tahun 2015 Tentang: *Pendirian Badan Usaha Milik Desa.*

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, nomor 23 tahun 2014 tentang :  
*Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2014 tentang: *Desa*



**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



**LAMPIRAN**